

Telaah Perubahan Stratifikasi Sosial Masyarakat Banten Sebelum Pemberontakan Tahun 1888

Kristoforus Bagas Romualdi

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹ kristoforusbagas@gmail.com ;

* Corresponding Author; Kristoforus Bagas Romualdi



Received 9 April 2023; accepted 19 Mei 2023; published 30 Juni 2023

ABSTRACT

This study aims to examine changes in social stratification in Banten society before the 1888 peasant revolt in the area. The research approach used was qualitative with historical methods. The sources used in this historical method are document sources in the form of books and relevant research articles. The results of the study show that social stratification in Banten before the revolt in 1888 was divided into traditional stratification and changed to colonial. The difference between the two stratifications lies in the position, function, influence, rights, and obligations of groups occupying the upper, middle and lower layers. The stratification of the colonial period which tended to be oppressive became the cause of the emergence of upheavals until the revolt of Banten Peasant's in 1888.

KEYWORDS

History;
Social Stratification;
Banten.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Pemberontakan yang terjadi di Banten pada tahun 1888 merupakan fenomena gerakan sosial yang melibatkan lapisan masyarakat bawah dengan tujuan meruntuhkan dominasi sistem Barat yang masuk dan mengganti sistem tradisional pada waktu itu. Pemberontakan ini juga disertai dengan semangat keagamaan, di antaranya Messiahistik. Maka, dalam pemberontakan tersebut, bukan hanya petani saja yang menjadi “aktor” sejarah, melainkan para ulama atau tokoh agama juga ikut ambil bagian penting terutama dalam rangka membakar semangat perjuangan para petani. Bahkan, tokoh agama seperti Haji Wasid bersama beberapa haji lainnya menjadi pengorganisir gerakan yang memulai pemberontakan di wilayah Cilegon pada 9 Juli 1888 tersebut (Kartodirdjo, 1984: 291).

Adapun penolakan terhadap sistem Barat sendiri bisa terjadi karena dinilai telah menyebabkan kelompok masyarakat khususnya kalangan petani di Banten saat itu mengalami penderitaan lantaran harus membayar pajak yang lebih tinggi, wajib ikut kerja paksa, dan lain-lain. Masuknya hegemoni Belanda yang dimulai pada tahun 1808 tersebut kemudian juga memengaruhi stratifikasi atau hierarki sosial masyarakat Banten yang sebelumnya dikenal dengan istilah undakan (Kartodirdjo, 1984: 75). Di antaranya, pihak Sultan dan keluarga yang menempati urutan pertama dalam stratifikasi fase tradisional harus kehilangan pengaruh politik yang dominan dan juga kehilangan beberapa hak istimewa atas tanah sejak kehadiran pengaruh Belanda. Sementara posisi ulama atau pemuka agama yang mempunyai nilai prestise, semakin kuat dalam kehidupan masyarakat Banten yang mayoritas Islam dan saat itu hidup menderita. Dengan kata lain, kehadiran sistem Barat telah mengubah stratifikasi, fungsi, hingga hak dan kewajiban sosial masyarakat tradisional Banten kala itu. Perubahan yang justru melahirkan penindasan inilah yang kemudian mendorong munculnya gerakan sosial melawan pemerintah kolonial setempat di wilayah Banten.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana perubahan stratifikasi sosial pada masyarakat Banten yang berdampak pada perubahan fungsi, pengaruh, hak dan kewajiban individu masyarakat yang kemudian menyulut terjadinya pemberontakan di wilayah tersebut pada tahun 1888.

2. Metode Penelitian

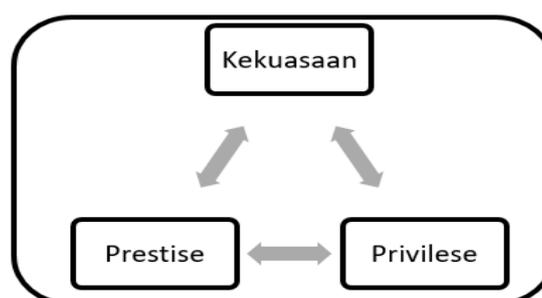
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015: 55). Adapun metode yang digunakan pada pendekatan kualitatif ini adalah metode sejarah. Menurut Garraghan seperti dikutip dari Abdurahman (2007: 53) metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Metode historis dilakukan melalui sistematika sebagai berikut:

1. Heuristik, yakni proses pengumpulan sumber atau data sejarah. Dalam tahapan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai sarana pokok untuk mengumpulkan data sejarah, yakni dokumen berupa buku dan artikel penelitian yang relevan.
2. Kritik, yakni proses peneliti mengkritik, memilah-milah dokumen buku dan artikel penelitian yang telah ditemukan melalui proses *heuristik* secara internal dan eksternal agar mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Intepretasi, proses peneliti menganalisis temuan pada dokumen yang telah diuji keabsahannya pada proses kritik. Pada proses ini juga, peneliti mencoba untuk menafsirkan dan menjabarkan analisis dokumen yang didapat dari buku dan artikel jurnal berdasarkan konsep teori stratifikasi sosial.
4. Historiografi, yakni proses peneliti menyusun penelitian atau laporan secara deskriptif-analitis setelah melalui tahapan heuristik, kritik, dan intepretasi

3. Tinjauan Penelitian

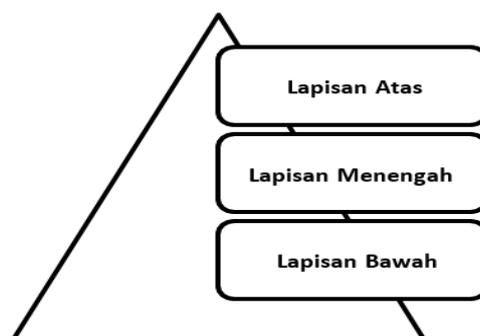
3.1 Konsep Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dikutip dari Indianto Muin (2004: 48) adalah sistem yang menjadi pembeda antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan terdapat pembedaan hak serta kewajiban antar individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Sementara menurut Pritim A. Sorikin inti dari stratifikasi sosial adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat (Wulansari, 2009: 101). Dua pengertian tersebut memperlihatkan bahwa stratifikasi sosial berkaitan dengan adanya penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Penggolongan tersebut terjadi diindikasikan dari adanya perbedaan hak dan kewajiban serta pengaruh keberadaan individu tersebut di tengah-tengah masyarakat. Namun, menurut Robert (1998) sebagaimana dikutip dari (Maunah, 2015: 24) penggolongan dalam konteks yang lebih hierarkis terjadi berdasarkan dimensi kekuasaan, *privilese*, dan *prestise*. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan bisa dilihat pada gambar yang diadopsi dan dimodifikasi dari (Hariyanto, 2012: 116):



Gambar 1. Hubungan antara Kekuasaan, Privilese, dan Prestise

Individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan dominan biasanya akan menempati urutan paling atas. Melalui kekuasaan tersebut, seseorang atau kelompok orang akan mendapatkan *privilege* dan *prestise*. *Privilege* merupakan hak istimewa atau hak untuk memperoleh perlakuan khusus sedangkan *prestise* memiliki arti sebagai kehormatan (Sinanto & Awaru, 2017: 19). Pada kondisi tertentu, *privilege* dan *prestise* bisa didapatkan dari luar unsur kekuasaan. Misalnya saja dalam sistem masyarakat yang mendapat pengaruh kuat agama, maka para pemuka agama mendapatkan *privilege* dan *prestise* karena dianggap sebagai sosok panutan dan berilmu meskipun tidak duduk di kursi kekuasaan. Dalam masyarakat kota yang identik dengan industri, maka orang yang mapan secara ekonomi akan mendapatkan perlakuan khusus dan kehormatan. Di desa, *privilege* dan *prestise* bisa didapatkan oleh petani pemilik lahan atau orang yang punya pendidikan tinggi. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedudukan masyarakat dalam struktur sosial di setiap tempat berbeda-beda karena faktor situasi dan budaya. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Sinanto & Awaru (2017: 19) yang menyebutkan bahwa memahami konsep kehormatan dalam stratifikasi masyarakat harus dikaitkan dengan suatu kebudayaan atau sistem sosial tertentu. Ketika seseorang mendapatkan kehormatan karena latar belakang tertentu, maka orang tersebut juga akan mendapatkan hak istimewa. Latar belakang tersebut bisa berupa kekuasaan, kekayaan, profesi, keaslian anggota masyarakat dan lain-lain (Suhaeni, 2018:46-47). Kondisi latar belakang itu pula yang kemudian akan menempatkan individu berada pada lapisan atas, menengah, atau lapisan bawah dengan hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Apabila digambarkan dengan piramida, maka stratifikasi dengan sistem lapisan bisa dilihat di gambar berikut (Aji, 2015: 227) :



Gambar 2. Lapisan stratifikasi sosial

Lapisan stratifikasi sosial seperti gambar di atas ada yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup. Menurut Purwanto (2007) dalam Sa'ur (2015: 7) pada lapisan sosial yang sifatnya terbuka (*open social stratification*), individu dapat berpindah-pindah lapisan karena situasi dan kondisi tertentu. Sementara pada lapisan sosial tertutup (*closed social stratification*), individu tidak dapat berpindah lapisan sama sekali baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Namun, baik stratifikasi terbuka ataupun tertutup sama-sama akan menempatkan individu dalam lapisan yang berbeda-beda sesuai latar belakangnya dan sistem sosial dalam masyarakat tempat individu tersebut tinggal.

Memahami sifat stratifikasi sosial terbuka dan tertutup secara lebih lanjut dapat dilakukan dengan mempelajari jenis lapisan stratifikasi yang diperkenalkan oleh antropolog Ralph Linton pada tahun 1936, yakni *Ascribed Status*, *Achieved Status*, dan *Assigned Status*. Kajian dari Ralph Linton tersebut dijelaskan dalam buku Wulansari (2009: 107-109), yakni pertama *Ascribed Status* berupa kedudukan yang diperoleh individu dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh perbedaan rohaniah dan kemampuan karena kedudukan ini lebih disebabkan pada faktor kelahiran. Jika dilihat dari pengertiannya, maka *Ascribed Status* lebih condong pada lapisan stratifikasi sosial tertutup karena status didapatkan dari kelahiran, contohnya adalah sistem kasta.

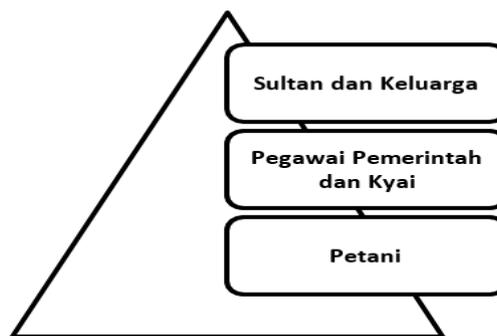
Kedua *Achieved Status* yakni, kedudukan dalam stratifikasi sosial yang dicapai oleh individu dengan sengaja. Kedudukan ini diperoleh berdasar kelahiran tetapi karena dicapai dengan "sengaja", maka jenis ini sangat terkait erat dengan lapisan stratifikasi sosial terbuka. Artinya, siapapun dapat menduduki lapisan tertentu tergantung pada kemampuannya dalam mengejar tujuan-tujuannya. Terakhir adalah *Assigned*

Status yang merupakan kedudukan yang didapatkan oleh seseorang karena dianggap telah berjasa. Mencermati dari keterangan pemberian kedudukan akibat jasa, maka jenis ini terkait erat dengan lapisan stratifikasi sosial terbuka dan pada konteks tertentu punya hubungan dengan *Achieved Status*. Misalnya, pengangkatan seseorang menjadi pegawai tetap pemerintah karena telah berjasa melalui karya inovasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Banten pada masa kerajaan telah mengenal konsep stratifikasi sosial. Dalam buku Sartono Kartodirdjo (1984: 75), masyarakat tradisional Banten menyebutnya dengan istilah *undakan*. *Undakan* ini didasarkan pada sistem feodalisme khas kerajaan agraris meski Banten sendiri juga berposisi sebagai kota dagang karena posisinya yang dekat dengan pesisir. Salah satu ciri kuat masyarakat agraris ini adalah jurang pemisah yang lebar dalam kekuasaan, hak istimewa, dan *prestise* yang terjadi antara kelas dominan dan subordinatnya (Syahrie, 2007: 37). Feodalisme yang muncul pada masyarakat agraris Banten menyebabkan raja atau keluarga bangsawan menempati urutan paling atas dalam lapisan sosial sementara petani menempati urutan terbawah. Lapisan tengah diisi oleh elit birokrasi kesultanan dan pemuka agama Islam. Namun, kehadiran pemerintah kolonial Belanda telah menggeser posisi raja dari puncak piramida *Undakan* tepatnya setelah perombakan yang dilakukan Daendels pada tahun 1808. Dalam kondisi yang berubah tersebut, petani masih menempati urutan terakhir.

4.1 Hierarki Masa Tradisional



Gambar 3. Piramida Stratifikasi Masyarakat Banten Masa Tradisional

Hierarki sosial yang terbentuk dalam masyarakat acapkali berimplikasi terhadap sistem atau situasi ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut juga berlaku di daerah Banten yang hierarkinya muncul akibat sistem feodalisme. Dalam masyarakat tradisional Banten, seperti yang terlihat pada gambar 3, Sultan dan keluarganya yang bisa disebut sebagai kaum bangsawan merupakan golongan pertama yang berada di puncak hierarki sosial (Kartodirdjo, 1984: 75). Indikator kedudukan tersebut selain karena kekuasaan yang dimiliki, Sultan sendiri merupakan pemilik tanah atau sawah yang paling dominan. Pada pola feodalisme tradisional Banten, semua sawah yang dibuka atas perintah sultan dan keluarganya, termasuk tanah yang diberikan oleh sultan kepada kelompok kelas sosial lain disebut sebagai sawah negara. Artinya semua tanah tersebut adalah milik sultan seutuhnya dan ia berhak menerima upeti atas hasil pengolahan lahan.

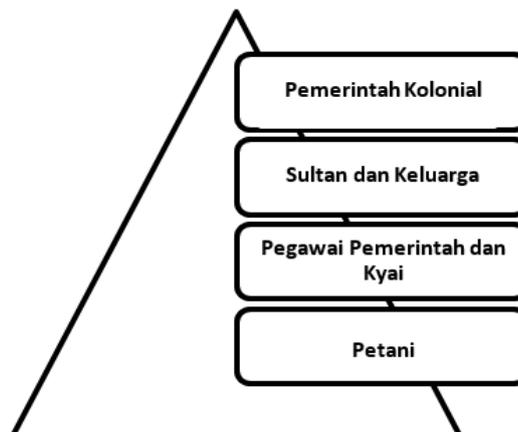
Keluarga raja sendiri masih dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama yang memiliki hubungan darah terdekat memakai gelar Pangeran, Ratu, Tubagus. Sementara golongan kedua disebut *nayaka*, yakni keturunan jauh raja setelah beberapa generasi. Seorang *nayaka*, biasanya hanya diperbolehkan menggunakan gelar Ratu atau Tubagus. Maka, dapat disimpulkan bahwa *prestise* ataupun *privilege* yang didapatkan oleh Sultan dan keluarganya baik berupa tanah, hak upeti, hingga gelar masuk dalam jenis lapisan *Ascribed Status* karena didapat dari faktor kelahiran atau garis hubungan darah/keturunan. Di luar keluarga raja, ada juga kelompok yang menggunakan nama gelar khusus seperti Mas, Entol, Ujang, Apun, dan Raden untuk laki-laki, serta Ayu untuk perempuan. Gelar-gelar tersebut didapatkan karena mempunyai *prestise* di kalangan masyarakat (Suhaedi, 2006: 290).

Setelah kelompok bangsawan, ada pamong praja yang menempati urutan kedua dalam hierarki masyarakat tradisional Banten. Pamong praja adalah pegawai pemerintahan yang tidak memiliki ikatan darah dengan pihak sultan dan keluarganya. Sekalipun pamong praja tersebut ada yang menduduki struktur jabatan tinggi, mereka tetap akan masuk dalam kategori masyarakat kelas dua jika tak ada pertalian darah dengan sultan. Selain pamong praja, hierarki ke dua ini juga diisi oleh para elit agama, yakni para kyai yang dipandang tinggi derajatnya oleh masyarakat Banten yang notabene mayoritas beragama Islam (Kartodirdjo, 1984: 84). Sederhananya, kehidupan masyarakat yang religius didasarkan pada suatu kesakralan Tuhan telah menjadikan masyarakat Banten mempunyai ikatan lebih erat terhadap tokoh-tokoh agama yang berperan sebagai pemandu kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat (Muslimah, 2017: 140). Di samping itu, pemuka agama seperti Kyai merupakan “perpanjangan tangan” Sultan dalam proses Islamisasi di daerah-daerah pedesaan sehingga hal tersebut turut memperkuat posisi pemuka agama dalam struktur masyarakat Banten (Tihani, 2015: 2). Posisi tersebut menyebabkan pemuka agama mendapat *prestise* karena faktor sosial budaya masyarakat Banten yang didominasi oleh pengaruh agama Islam. Pemuka agama dinilai sebagai individu yang menjadi panutan oleh masyarakat karena ilmu agama yang dimiliki, sehingga apa yang disampaikan dan diajarkan oleh pemuka agama kemungkinan besar akan diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Golongan ketiga yang sekaligus menempati urutan terakhir dalam hierarki masyarakat tradisional Banten adalah golongan petani. Petani di sini dibagi menjadi dua golongan. Pertama, ada petani mardika yang terdiri dari orang-orang yang diberi status sebagai orang merdeka karena bersedia untuk tunduk kepada penguasa dan mau memeluk agama Islam. Yang kedua adalah petani abdi, yakni kelompok orang yang telah ditaklukkan melalui kekerasan dan kemudian dijadikan sebagai budak. Para petani ini merupakan penerima hadiah sawah negara dari penguasa yang meliputi daerah-daerah dataran rendah sekitar Teluk Banten. Tanah-tanah yang didapatkan petani ini disebut sawah yasa. Namun, meskipun para petani tersebut punya kepemilikan penuh atas tanahnya dan ikut serta membuka lahan, pada budaya feodal yang kuat di Kesultanan Banten, mereka justru memiliki hak yang berbeda dengan kaum bangsawan (Kartodirdjo, 1984: 58-60).

Dalam kebijakan ekonomi agraria masa tradisional ini, para penggarap sawah yasa mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada sultan atau para pemilik sawah negara yang berkuasa di daerah tersebut sebesar sepersepuluh dari hasilnya (10%) sebagai tanda patuh. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk melakukan kerja bakti, merawat sawah-sawah negara milik sultan dan keluarganya (Kartodirdjo, 1984: 60). Pada sistem ini, para petani dapat diusir secara sewenang-wenang. Meskipun di satu sisi, petani juga dapat meninggalkan garapan mereka kapan saja. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dicermati bahwa petani sebagai kelompok yang menempati lapisan terbawah mempunyai kewajiban berbeda karena harus membayar upeti kepada penguasa sekalipun di antara mereka ada yang menerima hadiah tanah.

4.2. Hierarki Masa Kolonial



Gambar 4. Piramida Stratifikasi Masyarakat Banten Masa Kolonial

Ketika Belanda datang, secara bertahap struktur hubungan-hubungan politik tradisional di Kesultanan Banten diputus dan diubah ke pola *rasional-legal* (Suhaedi, 2006: 292). Upaya tersebut menyebabkan kedudukan Sultan dan keluarganya yang semula berada di posisi teratas hierarki sosial masyarakat Banten digantikan oleh posisi pemerintah kolonial seperti yang terlihat pada gambar 4. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan turut memberi andil pada perubahan stratifikasi sosial karena Sultan yang sudah mempunyai kekuasaan, *privilese* dan *prestise* pun dapat tergantikan oleh pemerintah kolonial yang mempunyai kekuatan jauh lebih unggul. Pergantian posisi yang terjadi kala itu turut menyebabkan perubahan kebijakan ekonomi agraria mengenai sistem tanah dan pajak. Apalagi, pada tahun 1808, Daendels yang duduk sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, menghapus sistem Kesultanan dan mewajibkan kerja rodi serta pengumutan seperlima bagian dari hasil panen atau sebesar 20% sebagai pajak tanah untuk seluruh daerah dataran rendah di Banten (Kartodirdjo, 1984: 53).

Beberapa tahun kemudian, Raffles yang sempat duduki kursi Gubernur Jendral menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah (Kartodirdjo, 1984: 61). Akibatnya, pajak atau upeti yang sebelumnya dibayar kepada pihak kesultanan dihapus dan dialihkan ke pihak kolonial. Sementara pihak keluarga dari Sultan yang dulu menerima pembagian tanah tidak kehilangan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah negara, tetapi harus rela kehilangan hak upeti. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan ganti rugi atas hilangnya pendapatan dari kerja bakti dan upeti. Pada konteks tersebut para bangsawan merasa dirugikan oleh sistem baru ini. Dalam perjalanan waktu, sistem baru tersebut juga telah menjadi "lahan basah" bagi para pamong praja untuk melakukan tindakan korupsi (Kartodirdjo, 1984: 58). Unsur pamong praja sendiri turut berubah dengan terdiri dari orang Eropa dan pribumi yang dinilai punya kesetiaan dengan Belanda (Kartodirdjo, 1984: 133). Pada kondisi ini, posisi pamong praja cenderung ke arah *Achieved Status* di masa kolonial selama punya kemampuan dan berpihak ke Belanda, di samping juga mempunyai *privilese* karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah, namun di satu sisi kehilangan *prestise* lantaran menjadi objek kebencian masyarakat. Pejabat-pejabat pamong praja terkhusus pribumi dinilai sebagai orang-orang hina karena dekat dengan pemerintah kolonial yang dianggap kafir (Kartodirdjo, 1984: 242). Masyarakat menilai para pejabat tersebut sudah mencemarkan agamanya sendiri. Mereka juga dinilai sebagai kelompok penindas dan korup. Hal itu pula yang mendasari alasan masyarakat menentang penetrasi administrasi kolonial hingga ke desa-desa.

Peran pemuka agama juga semakin kuat pada sistem pelapisan sosial era kolonial terutama setelah melemahnya pengaruh golongan elit atau aristokrat. Namun, semakin kuatnya posisi pemuka agama bukan karena mereka mendapatkan *privilese* dari pemerintah kolonial, melainkan karena kondisi rakyat yang semakin menderita sehingga para pemuka agama menjadi tempat berkeluh kesah. Maka, tidak mengherankan apabila pemuka agama seperti kelompok haji memegang peranan penting saat

pemberontakan petani Banten tahun 1888. Hal tersebut terlihat dari perencanaan pemberontakan yang telah dipersiapkan secara tersruktur dan terencana melalui pertemuan-pertemuan selama enam bulan di beberapa rumah kyai terkemuka seperti Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail, dan Haji Wasid dengan kedok pesta, dan lain-lain (Kartodirdjo, 1984: 280). Peran pemuka agama juga terlihat melalui propaganda ramalan akan tibanya Mahdi dalam Islam dan juga mengajarkan tentang konsep jihad. Imam Mahdi sendiri diyakini sebagai sosok Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan sebelum datangnya hari kiamat.

Propaganda kedatangan Mahdi tersebut juga terlihat cocok untuk membangkitkan semangat revolusi masyarakat kelas bawah Banten guna melawan dominasi kolonial (Kartodirdjo, 1984: 137). Ditambah, ada ketidaksukaan rakyat terhadap peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, seperti penarikan pajak, dan penetrasi administrasi kolonial hingga ke desa-desa. Maka dari itu, para kyai terus berusaha menanamkan kecurigaan yang mendalam terhadap kolonial yang dinilai telah melakukan kezaliman di dunia. Ketaataan buta kepada guru atau kyai yang sangat kuat di kalangan masyarakat Banten turut membuat propaganda Mahdi dan keberadaannya kian dinantikan. Propaganda Perang Sabil juga ditiupkan dengan cita-cita mendirikan negara Islam merdeka yang bebas dari hegemoni asing. Pada masa ini pula, tarekat-tarekat di bawah naungan beberapa kyai tumbuh subur dan kokoh (Kartodirdjo, 1984: 213).

Pada perubahan stratifikasi sosial masa kolonial, hal yang sama sekali tidak berubah adalah para petani pemilik sawah yasa tetap menjadi kelompok yang wajib membayar upeti atau pajak. Padahal, dalam struktur lama, para petani sudah cukup tertindas karena kewajiban pembayaran upeti kepada pihak kesultanan. Pada struktur yang baru pun mereka kembali mengalami penindasan bahkan berlipat ganda, dimulai sejak zaman Deandels. Hal itu dikarenakan ada kalangan bangsawan yang berusaha mempertahankan sistem lama meskipun telah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah kolonial. Petani akhirnya harus membayar upeti dibersamai dengan melakukan kerja bakti menurut sistem tradisional, dan secara terpisah harus membayar pajak sewa tanah berdasarkan sistem kolonial. Celaknya, dalam sistem pajak tanah kolonial, pembayaran harus dilakukan berdasarkan luas lahan garapan dan produktivitasnya. Persoalan pun kemudian muncul karena pengawasan ketat dari pamong praja tidak disertai dengan data pasti terkait luas lahan garapan petani sehingga sering terjadi manipulasi. Dalam laporannya, petani disebut mempunyai produktivitas yang tinggi serta lahan yang luas sehingga harus bayar pajak yang mahal, sementara elit desa hanya membayar sedikit karena dengan *prestise* yang dimiliki, mereka bisa menekan para pamong praja (Kartodirdjo, 1984: 61).

Situasi semakin diperparah karena petani harus kerja rodi, seperti menjaga rumah-rumah anggota pamong praja (Eropa), membersihkan kebun-kebun mereka, mencari kayu bakar, mencari rumput untuk kuda-kuda pamong praja, dan sebagainya (Kartodirdjo, 1984: 68). Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem serta kebijakan baru yang dimunculkan oleh pemerintah kolonial Belanda bukannya meringankan beban mereka, tetapi justru menambah penderitaan mereka. Tidak hanya itu, juga berlaku pajak perdagangan atau perahu yang diukur berdasarkan tonase (muatan ton). Nilai setiap tonase terhitung tinggi sehingga berdampak pada stabilitas perdagangan. Celaknya, dalam proses penarikan pajak perdagangan tersebut, sering terjadi kesalahan pengukuran sehingga bobot tonasenya melebihi dari yang sebenarnya. Ada juga pemberlakuan pajak pasar terhadap para pedagang (Kartodirdjo, 1984: 90-92). Kekacauan sistem itu pun merembet ke kekacauan ekonomi, di mana mulai tumbuh subur penyamun dan perampok. Kondisi sosial-ekonomi pada stratifikasi ala kolonial tersebut yang menjadi deretan indikator selain kebangkitan agama yang menyebabkan terjadinya pemberontakan petani Banten tahun 1888.

5. Kesimpulan

Stratifikasi sosial merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan masyarakat senantiasa mempunyai pandangan akan sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga seperti jabatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Maka, dalam stratifikasi sosial ada lapisan-lapisan yang akan memperlihatkan perbedaan fungsi, pengaruh, hingga hak dan kewajiban dalam struktur masyarakat. Hal tersebut tampak pada stratifikasi sosial masyarakat Banten di masa tradisional, di mana Sultan dengan kekuasaannya menempati urutan pertama dan mendapat *privelese* serta *prestise* berupa tanah, hak upeti,

hingga gelar. Dilanjutkan dengan lapisan pamong praja yang menjadi elit birokrat. Pada lapisan kedua juga ada pemuka agama yang mempunyai *prestise* kuat karena faktor sosial-budaya masyarakat Banten yang bercorak Islam, sehingga pengaruhnya begitu kuat. Terakhir ada kelompok petani yang berkewajiban untuk membayar upeti kepada pihak Kesultanan.

Belanda yang masuk ke Banten perlahan tapi pasti mengubah sistem sosial. Akibatnya terjadi perubahan stratifikasi sosial dengan pemerintah kolonial menempati urutan lapisan teratas menggeser Sultan dan keluarganya. Hal itu terbukti dengan kemampuan pihak kolonial mengubah kebijakan di Banten seperti penghapusan hak upeti Kesultanan, mengubah komposisi pamong praja, dan juga mengubah kewajiban yang semakin memberatkan petani. Ketimpangan yang semakin menguat dalam stratifikasi sosial Banten di masa kolonial kemudian mendorong terjadinya pemberontakan petani Banten 1888 yang turut disertai semangat keagamaan. Maka, dapat dilihat bahwa meskipun stratifikasi sosial adalah sebuah keniscayaan, namun jika ada perubahan yang menyebabkan lapisan tertentu tertindas, akan berpotensi menimbulkan gejolak atau konflik.

References

- Abdurahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Aji, R. H. (2015). Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas. *Jurnal Sosial dan Budaya Syari'i*, 2(1), 31-48.
- H.M.A.Tihami. (2015). Kiyai dan Jawara Banten: Keislaman, Kepemimpinan dan Magic. *Jurnal Refleksi*, 14(1), 1-24.
- Hariyanto. (2012). Priyisme dan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(2), 111-129.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888, Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Maunah, B. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ta'alam: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 19-38.
- Muin, I. (2004). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Muslimah. (2017). Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 13(1), 136-162.
- Sa'ur. (2015). Dampak Pendidikan Masyarakat terhadap Stratifikasi Sosial di Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B. Kabupaten Kubu Raya Ditinjau Teori Struktural Fungsional oleh Tallcot Parsons. *Jurnal Si Sosiologi*, 3(4), 1-10.
- Sinanto, A. A., & Awaru, A. O. (2017). Privilese pada Siswa di SMA Negeri 2 Sengkang Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiolog*, 4(3), 18-28.
- Suhaedi. (2006). Kekuasaan, Kekerasan, dan Mobilitas Jawara. *Al-Qalam*, 23(2), 287-309.
- Suhaeny, E. (2018). Pendidikan dan Pelapisan Sosial (Social Stratification). *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, 12(1), 45-55.
- Syahrie, S. P. (2007). Jalanan Feodalisme dan Kapitalisme Agraris: Telaah Terhadap Buku "Kebesaran dan Tragedi Kota Banten. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 33-41.
- Wulansari, C. D. (2009). *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.